



PEMERINTAH
KABUPATEN
LOMBOK TENGAH



LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



DISUSUN OLEH :
Diskominfo Lombok Tengah

<https://lomboktengahkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pelayanan umum, PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan kegiatan yang telah disusun sebelumnya dengan harapan pemahaman mengenai keterbukan informasi dapat meningkat.

Semoga dengan telah diselesaikannya Laporan Tahunan PPID Kabupaten Lombok tengah Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan memberikan motivasi bagi masyarakat dan khususnya bagi PPID OPD (pembantu).

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabaraktuh.

Praya, 22 Januari 2026
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 19690815 198903 1 007

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
A. Pendahuluan	1
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	1
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	1
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2
3. Sarana dan Prasarana Layanan	3
4. Sumber Daya Manusia	4
5. Hasil Layanan Informasi Publik	4
a. Permohonan informasi	4
b. Daftar Informasi Publik (DIP)	6
c. Informasi Publik yang Ditolak	7
6. Anggaran Layanan Informasi Publik	7
7. Kendala Pelayanan	7
a. Kendala Internal	7
b. Kendala External	8
8. Kegiatan Yang Telah Di Lakukan	8
C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	10
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	11
E. Prestasi	14
F. Penutup	15
Lampiran Penghargaan	16

A. Pendahuluan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi landasan penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tonggak penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sejak diundangkan, undang-undang ini telah memberikan arah baru bagi tata kelola informasi publik di negara Republik Indonesia.

Dalam konteks yang semakin kompleks dan dinamis, keterbukaan informasi publik menjadi prinsip yang mendasar untuk membangun negara yang demokratis dan berkeadilan. Undang-undang ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh lembaga publik, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan, mengawasi kinerja pemerintah, serta memperjuangkan hak-hak mereka.

Melalui pendekatan yang inklusif, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk secara proaktif menyediakan informasi yang penting dan relevan bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga membantu dalam membangun kepercayaan dan mengurangi kesenjangan informasi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Peraturan Bupati No 35 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lebih lanjut menjabarkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Sesuai perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mencakup landasan hukum, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal yang dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya:

1. Website Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah <https://lomboktengahkab.go.id/> dan 46 website Organisasi Perangkat Daerah.
2. Sosial media masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan bupati Lombok tengah No : 62 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjadi *stakeholder* mengelola PPID Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi

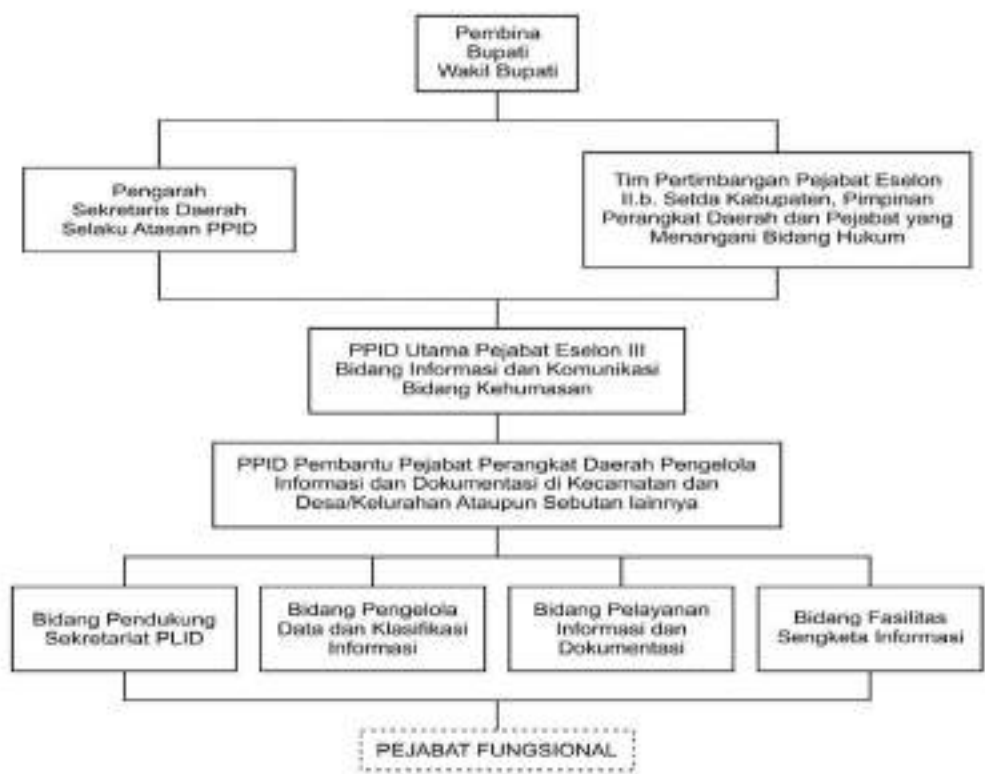
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Lombok tengah berdasarkan Peraturan Bupati No 35 tahun 2017. Memiliki susunan keorganisasian sebagai berikut :

- a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
- c. Ketua : Asisten Administrai Umum
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- e. Anggota
 - Inspektur Kabupaten Lombok Tengah
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi Publik dan E-Government
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah
 - Fungsional Analisis Kebijakan
 - Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda

Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas infomasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakanin formasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Lombok Tengah

3. Sarana dan Prasarana Layanan

a. Desk Pelayanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di lantai Kantor Bupati Baru Gedung A Lantai 3, Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah .

Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam pelayanan informasi

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WITA	12.00 - 13.30 WITA
Jumat	08.00 - 15.30 WITA	11.30 - 14.00 WITA

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Pelayanan Informasi

Pelayanan keterbukaan informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari aplikasi, website dan sosial media. Kerena di tengah era pelayanan digitalisasi menjadi bagian keharusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

1. Aplikasi ppid <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/>
2. Apliaski Lapor <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-lombok-tengah>
3. Website Utama <https://lomboktengahkab.go.id/> dan Website 46 OPD.
4. Sosial media mulai dari Youtube, Instagram, page Facebook Diskominfo Lombok Tengah dan media sosial 46 OPD.

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah adalah Asisten Administrasi Umum yang di koordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretaris PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah dan dibantu oleh Anggota yang berisikan Pejabat eselon II, III dan Pejabat Fungsional antara lain Inspektur Kab Lombok Tengah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda sedangkan untuk Penanggung Jawab di tingkat PPID OPD (pembantu) ada di bidang Sekretariat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan atau Sekretaris Camat yang bertindak sebagai kepala PPID OPD (pembantu) dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Untuk PPID Utama telah dikuatkan dengan di keluarkan SK Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

a. Permohonan Informasi

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik yang masuk di aplikasi <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/> sebanyak 22 permohonan informasi. Dengan rincian permohonan ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pertanian.

Permohonan informasi publik yang diberikan sebanyak 12 permohonan, 4 permohonan ditolak 6 permohonan diproses. dengan beberapa alasan seperti tidak melampirkan KTP, bukan permohonan informasi melainkan laporan yang sudah memiliki portal sendiri <https://lapor.go.id>, data yang diminta tidak dikuasai, permintaan informasi yang berulang dan setiap pemohon bisa mengetahui alasan tidak diberikan informasi publik secara detail melalui <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/cek-permohonan-informasi.html>

Berikut rekap permohonan informasi publik yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Prangkat Daerah (OPD) periode Tahun Anggran 2024 yang masuk di aplikasi ppid.lomboktengahkab.go.id

CETAK LAPORAN DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI
TANGGAL 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025

CETAK LAPORAN DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI TANGGAL 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025						
#	Nama OPD	Jumlah Permasalahan				
		Jumlah Terima	Ditolak	Diketahui	Diproses	Ditolak
1	BAGAN KEPERAWATAN DAN PERSEKUTUAN SIKLUS DATA SAKIT/STRA	0	0	0	0	0
2	BAGAN KEPERAWATAN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
3	BAGAN KEPERAWATAN DAN/STRA	0	0	0	0	0
4	BAGAN PERSEKUTUAN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
5	BAGAN PERSEKUTUAN/STRA	0	0	0	0	0
6	BAGAN PERSEKUTUAN PERSEKUTUAN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
7	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
8	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
9	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
10	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
11	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
12	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
13	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
14	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
15	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
16	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
17	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
18	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
19	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
20	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
21	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
22	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
23	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
24	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
25	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
26	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
27	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
28	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
29	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
30	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
31	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
32	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
33	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
34	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
35	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
36	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
37	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
38	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
39	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
40	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
41	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
42	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
43	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
44	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
45	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
46	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
47	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
48	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
49	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
50	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
51	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
52	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
53	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
54	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
55	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
56	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
57	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
58	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
59	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
60	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
61	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
62	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
63	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
64	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
65	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
66	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
67	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
68	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
69	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
70	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
71	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
72	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
73	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
74	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
75	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
76	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
77	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
78	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
79	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
80	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
81	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
82	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
83	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
84	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
85	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
86	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
87	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
88	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
89	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
90	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
91	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
92	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
93	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
94	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
95	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
96	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
97	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
98	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
99	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0
100	DOKUMEN/STRA DAN/STRA	0	0	0	0	0

b. Daftar Inforormasi Publik

Daftar informasi publik (DIP) yang di publikasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten *Lombok Tengah* di aplikasi <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/> pada Tahun 2025 sebanyak 516 DIP yang terdiri dari informasi serta merta sebanyak 17 DIP,informasi berkala 465 dan informasi setiap saat sebanyak 34.

CATATAN LAPORAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK					
TANGGAL 1 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025					
No	Nama SIPI	Jumlah Informasi			
		Informasi Segera	Setiap Saat	Berkala	Setiap Saat
1	DINAS PERENCANAAN DAN PERTANAIAN	24	0	13	1
2	DINAS KEMENTERIAN DAN POLAKRUMAH	0	0	0	0
3	DINAS PERHUTANAN	12	0	21	0
4	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
5	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	0
6	DINAS PERHUTANAN	1	0	1	0
7	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
8	DINAS PERHUTANAN	0	0	1	1
9	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	10	0	11	0
10	BADAN KEMENTERIAN DAN PERENCANAAN DAN PERHUTANAN	14	0	14	0
11	BADAN KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	0	0
12	BADAN KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	10	0	11	0
13	DINAS KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
14	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	12	2	6	1
15	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
16	DINAS KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	1	11	0
17	BADAN KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
18	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	0
19	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	11	0	14	1
20	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
21	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
22	KANTOR KEMENTERIAN	0	0	0	0
23	DINAS PERHUTANAN	11	0	11	0
24	BADAN KEMENTERIAN	11	0	11	0
25	DINAS KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	1
26	DINAS KEMENTERIAN	14	1	11	0
27	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
28	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	0
29	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	14	0	14	0
30	DINAS KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	1	11	1
31	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	1
32	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	11	1	0	1
33	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	14	0
34	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	0
35	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	0
36	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	14	0
37	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	0
38	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	14	0
39	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	0
40	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	1
41	DINAS KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
42	KANTOR KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	0
43	BADAN KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	11	0	11	0
44	BADAN KEMENTERIAN DAN PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	1	0	1	0
45	DINAS PERHUTANAN DAN PERHUTANAN DAN PERHUTANAN	0	0	0	0
46	PERHUTANAN	11	0	11	1

c. Daftar Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Daftar Permohonan Informasi publik yang ditolak pada Tahun 2025 sebanyak 4 daftar informasi publik, karena beberapa alasan seperti tidak melampirkan KTP, data yang diminta tidak dikuasai dan permohonan informasi yang berulang-ulang. Permohonan informasi yang ditolak ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Lingkungan Hidup.

Berikut ini rekap laporan daftar informasi publik yang ditolak tahun 2025

LAPORAN DAFTAR PERMHONAN INFORMASI PUBLIK
Dicetak Pada : 2026-01-06 11:09:29

No	No Register	Nama Pemohon	Dinas Tujuan	Status	Kategori Pemohon	Tanggal	Penggunaan DIP	Keterangan
1	P-10/PPID/BAPENDA/2025	Lalu Khaerul Fatoni	Badan Pendapatan Daerah	ditolak	perorangan	26 Maret 2025	Sebagai Bahan Literasi dan diskusi Bersama Kelompok dan masyarakat	Data yang diminta tidak ada di Bapenda, bisa coba minta pada OPD pengelola DBHCHT/BKAD
2	P-10/PPID/DUKCAPIL/2025	Tri Wahyono	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	ditolak	perorangan	18 Desember 2025	Pembuatan KTP dan KK	Silahkan ajukan melalui aplikasi SEMAIK Lombok Tengah secara online ya https://semaik.lomboktengah.kab.go.id/
3	P-10/PPID/DIKES/2025	kikuk kikuk kikuk	Dinas Kesehatan	ditolak	perorangan	13 Februari 2025	belajar bersama untuk kesehatan	Informasi yang diminta tidak jelas , jenis informasi atau data belajar bersama untuk kesehatan
4	P-10/PPID/DLH/2025	Farida Arfani	Dinas Lingkungan Hidup	ditolak	perorangan	23 Juli 2025	sebagai untuk pemenuhan tugas dan rencana tesis program studi magister teknik lingkungan di universitas islam indonesia D.I Yogyakarta	Silahkan ajukan permohonan data dulu ke Bakesbangpol Lombok Tengah. Setelah ada surat dari bakesbangpol baru bisa kami penuhi

6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Tahun Anggaran tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan Rp. 53.478.401 untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

7. Kendala Pelayanan

Adapun beberapa kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai pelaksana PPID Utama.

- a. Kendala Internal
 - 1. Belum adanya SDM atau petugas yang di siapkan khusus sebagai petugas pelayanan informasi di beberapa OPD. untuk sementara

penugasannya dirangkap oleh SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;

2. Pemahaman dalam hal informasi publik yang boleh diberikan atau dikecualikan masih kurang, sehingga saat permohonan informasi publik masih sering terjadi sengketa;
3. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Ruang pelayanan / desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
5. Dukungan anggaran yang belum maksimal.

b. Kendala External

1. Anggaran pendukung keterbukaan informasi publik ke setiap OPD masih belum maksimal;
2. Edukasi ke masyarakat luas tentang keterbukaan informasi publik masih rendah;

8. Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Adapun kegiatan pengutamaan kapasitas dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun Anggaran 2025. Mulai dari Surat Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjadi pedoman untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Kami juga telah melakukan FGD Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kabupaten Lombok Tengah Senin, 14 Juli 2025, untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan narasumber langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Bapak Sansuri, S.Pt.MM, Setda Lombok Tengah H. Lalu Firman Wijaya, ST., MT. Kegiatan dibuka langsung oleh Assiten III Setda Lombok Tengah Bapak Drs. H. M Zarkasi, berikut foto kegiatannya :





Dan di bulan September Tahun 2025 dilaksanakan juga kegiatan Bimbingan Teknis untuk Admin PPID Desa, ada 85 Desa yang mengikuti kegiatan BIMTEK yaitu Desa Jago, Bunut Baok, Mekar Damai, Ubung, Jelantik, Pengerjek, Nyerot, Gemel, Bonjeruk, Barejulat, Bujak, Selebung, Presak, Beber, Pagutan, Mekar Bersatu, Lendang Tampel, Sukadana, Rembitan, Tumpak, Mertak, Prabu, Tanak Awu, Dadap, Karame Jati, Banyu Urip, Mangkung, Kateng, Penujak, Selong Belanak, Mekar Sari, Tanak Rarang, Sukaraja, Mujur, Landah, Marong, Kidang, Beleke Lebe Sane, Pengonak, Lekor, Langko, Loang Maka, Bakan, Durian, Pendem, Selebung Rembige, Jango, Janggawana, Lingkok Berenge, Prigarata, Sepakek, Bagu, Sintung, Bilebante, Pemepek, Menemeng, Arjangka, Taman Indah, Monggas, Bebuak, Kopang Rembige, Dasan Baru, Wajegeseng, Aik Bual, Berinding, Pajangan, Beraim, Pejanggik, Dakung, Prai Meke, Lelong Montong Sapah, Ungga, Kabul, Pelambi, Darek, Pandah Indah, Serage, Montong Ajan, Teduh, Pandan Tinggang, Setiling, Tanak Beak, Teratak, dan Aik Berik.

Narasumber pada kegiatan BIMTEK diisi oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Bapak H Drs H M Zaini. Kegiatan ini untuk mendorong desa lebih memahami terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana kabupaten Lombok Tengah sengketa informasinya sudah masuk dilevel pemerintah desa.





C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi,
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pelayanan informasi melalui pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi salah satunya dengan rapat tentang penetapan Tim PPID OPD.
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang narasumber yang berkompeten.
5. Melakukan penambahan menu entry untuk pemohon dokumen secara offline di Aplikasi PPID Kabupaten Lombok Tengah.

D. Rincian Sengketa Informasi

Sengeketa informasi pada Tahun 2025 ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu berasal dari permohonan yang bersifat offline dan belum tercatat di sistem aplikasi <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/>. DiTahun 2025 terdapat 20 sengketa Informasi Publik Dikabupaten Lombok Tengah 12 dengan putusan adjudikasi, 1 pembatalan registrasi, 2 dengan penetapan Komisi Informasi dan 5 masih dalam proses.

Berikut Sengketa Infomasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025.

DATA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (KABUPATEN LOMBOK TENGAH) KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025					
NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
1	003/KINTB/PSI-REG/II/2025	L. KHAERUL FATONI	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan Dokumen Informasi (DPA) untuk Pembuatan Sumur Bor Tahun Anggaran 2022 2. Salinan Dokumen Informasi Sumber Dana untuk Pembuatan Sumur Bor Tahun Anggaran 2022 3. Salinan Dokumen Kontrak Kerja Pembuatan Sumur Bor Tahun Anggaran 2022 4. Salinan Dokumen Informasi Rincian (DPA) Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2022-2024 5. Salinan Dokumen Informasi Rincian (DPA) Untuk Program Penyediaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian Tahun Anggaran 2024 6. Dokumen Informasi Sumber Dana Untuk Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2022-2024 7. Dokumen Informasi sumber dana untuk program penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian Tahun Anggaran 2024 8. Dokumen Kontrak Kerja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2022-2024 9. Dokumen Kontrak Kerja Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	PUTUSAN NOMOR : 006/KINTB/PSI-KEP.2/III/2025
				Menunjang Fungsi Hunian Tahun Anggaran 2024	
2	004/KINTB/PSI-REG/II/2025	SYAMSUL RIZAL	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Dokumen informasi Salinan DPA pembangunan sarana dan prasarana KINT tahap III (DBCHT) Lokasi : Desa Sarabali, Kec. Batusukling Lombok Tengah TA 2024 2. Dokumen informasi kontrak kerja pembangunan sarana dan prasarana KINT tahap III (DBCHT) Lokasi : Desa Sarabali, Kec. Batusukling Lombok Tengah TA 2024	PEMBATALAN REGISTER
3	005/KINTB/PSI-REG/III/2025	LOMBOK.ATE.UNTUK.KEMANUASIAAN (LAUS)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan dokumen informasi payung hukum untuk penarikan retribusi pasar di kabupaten lombok tengah tahun 2023 dan tahun 2024 2. Salinan dokumen informasi jumlah pendapatan dari retribusi pasar ranteng praya, pasar jelejek kepung, pasar karang balek praya, pasar ganti desa ganti kecamatan praya timur dan seluruh pasar se Kabupaten Lombok Tengah. 3. Salinan dokumen informasi SK (surat keputusan) sama-nama sebagai penanggung jawab untuk melakukan penarikan retribusi pasar di setiap pasarnya se Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dan tahun 2024.	PUTUSAN NOMOR : 002/KINTB/PSI-KEP.1/V/2025

NO	KOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
4	006/KINTB/PSI-REG/III/2025	LOMBOKATE.UNTUK KEMAMUASIAAN (LAUR)	BAPPENDA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan dokumen informasi payung hukum untuk penarikan retribusi pasar di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dan tahun 2024 2. Salinan dokumen informasi jumlah pendapatan dari retribusi pasar renteng praya pasar jolojol kopang, pasar karang bulayak praya, pasar gantli desa gantli kecamatan praya timur dan seluruh pasar se kabupaten lombok tengah tahun 2023 dan tahun 2024	PUTUSAN NOMOR : 003/KINTB/PSI-KEP.1/V/2025
5	007/KINTB/PSI-REG/IV/2025	ANDRIAWAN	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Dokumen informasi sumber dana untuk pembangunan gedung PKM Pringgara Kabupaten Lombok Tengah TA 2024 2. Dokumen informasi DPA untuk pembangunan gedung PKM Pringgara Kabupaten Lombok Tengah TA 2024 3. Dokumen kontrak kerja pembangunan gedung PKM Pringgara Kabupaten Lombok Tengah	PUTUSAN NOMOR : 007/KINTB/PSI-KEP.2/III/2025
6	010/KINTB/PSI-REG/V/2025	ANDRIAWAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Dokumen informasi DPA untuk pembangunan/rehabilitasi kolam ikan di Kabupaten Lombok Tengah TA 2022-2024 2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja pembangunan/rehabilitasi kolam ikan di Kabupaten Lombok Tengah TA 2022-2024 3. Salinan dokumen informasi DPA pengadaan pakan Ikan Kecamatan Bantikling dan Bantikling Utara Kabupaten Lombok Tengah TA 2022-2024	PENETAPAN NOMOR : 001/KINTB/PSI-PNTP/VI/2025

NO	KOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				4. Salinan dokumen kontrak kerja pengadaan pakan Ikan Kecamatan Bantikling dan Bantikling Utara Kabupaten Lombok Tengah TA 2022-2024 5. Salinan dokumen informasi mekanisme pengadaan pakan Ikan Kecamatan Bantikling dan Bantikling Utara Kabupaten Lombok Tengah TA 2022-2024 6. Salinan dokumen informasi penerima manfaat pembangunan/rehabilitasi kolam Ikan di Kabupaten Lombok Tengah TA 2022-2024 dan penerima manfaat pengadaan pakan Ikan Kecamatan Bantikling dan Bantikling Utara Kabupaten Lombok Tengah, by name by address TA 2022-2024	
7	011/KINTB/PSI-REG/V/2025	KHAERUL FATONI	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Dokumen informasi rekapitulasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) murni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah TA 2022-2024 2. Dokumen informasi rekapitulasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pengeseran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah TA 2022-2024 3. Salinan dokumen informasi DPA pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan penangkaran di TPA/TPST/SOA kabupaten/kota TA 2024 4. Salinan dokumen informasi kontrak kerja penyediaan sarana dan prasarana	PENETAPAN NOMOR : 002/KINTB/PSI-PNTP/VI/2025

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA kabupaten/kota TA 2024 5. Salinan dokumen informasi mekanisme penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SDA kabupaten/kota TA 2024	
8	012/KINTB/PSI-REG/VI/2025	LUMBOK ATE UNTUK KEMANUSIAAN (LAUK)	DINAS SOSIAL LOMBOK TENGAH	1. Salinan informasi DPA untuk setiap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan yang sumber dananya dari DBH-CHT tahun 2025 yang di dapat oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dengan pagu anggaran Rp 831.603.000 di APBD Kabupaten Lombok Tengah TA 2025 2. Salinan dokumen informasi nama-nama penerima BLT di Kabupaten Lombok Tengah TA 2025 By Name, By Address dan SK Penetapan	PUTUSAN NOMOR : 012/KINTB/PSI-KEP.2/VIII/2025
9	013/KINTB/PSI-REG/VI/2025	LUMBOK ATE UNTUK KEMANUSIAAN (LAUK)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan dokumen informasi DPA untuk penataan lingkungan se kabupaten Lombok Tengah TA 2022,2023,dan 2024 dari APBD murni maupun APBD perubahan Kabupaten Lombok Tengah 2. Salinan dokumen informasi kontrak kerja untuk penataan lingkungan se Kabupaten Lombok Tengah TA 2022, 2023, dan 2024 dari APBD murni maupun APBD perubahan Kabupaten Lombok Tengah	PUTUSAN NOMOR : 010/KINTB/PSI-KEP.2/VIII/2025

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
10	014/KINTB/PSI-REG/VI/2025	LUMBOK ATE UNTUK KEMANUSIAAN (LAUK)	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan dokumen informasi DPA untuk setiap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan yang sumber dananya dari DBH-CHT TA 2025 yang didapat oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah dengan pagu anggaran Rp 660.390.000 di APBD Kabupaten Lombok Tengah TA 2025 dan DPA dari DBH-CHT TA 2024 2. Salinan dokumen informasi nama-nama kegiatan beserta SPnya di TA 2024 dan 2025 di Kabupaten Lombok Tengah	PUTUSAN NOMOR : 004/KINTB/PSI-KEP.1/VII/2025
11	015/KINTB/PSI-REG/VI/2025	LUMBOK ATE UNTUK KEMANUSIAAN (LAUK)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan Dokumen Informasi DPA untuk setiap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan yang sumber dananya dari DBH-CHT TA 2025 yang didapat oleh SatPOLPP Kabupaten Lombok Tengah dengan pagu anggaran Rp 1,2M di APBD Kabupaten Lombok Tengah TA 2025 2. Salinan dokumen informasi nama-nama kegiatan beserta SPnya TA 2024 dan 2025 di Kabupaten Lombok Tengah	PUTUSAN NOMOR : 011/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2025
12	016/KINTB/PSI-REG/VI/2025	LUMBOK ATE UNTUK KEMANUSIAAN (LAUK)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan dokumen informasi DPA untuk setiap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan yang sumber dananya dari DBH-CHT TA 2025 yang di dapat oleh Disperindag dengan pagu anggaran Rp 7 M dari APBD Kabupaten Lombok Tengah 2. Salinan dokumen informasi kontrak kerja untuk pemanfaatan dan penggunaan DBH-CHT baik fisik maupun non fisik di Dinas	PUTUSAN NOMOR : 013/KINTB/PSI-KEP.2/VIII/2025

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
15	019/KINTB/PSI-REG/VI/2025	LUMBOK ATE UNTUK KEMANUSIAAN (LAUK)	PERUMDA AIR MINUM TIRTA ARDHA RINJANI LOMBOK TENGAH	1. Salinan dokumen informasi belanja perjalanan dinas Direktur Utama di seluruh pegawai PDAM Tirta Ardha Rinjani Lombok Tengah Tahun 2023 dan 2024 baik yang keluar daerah maupun dalam daerah NTB 2. Salinan dokumen informasi belanja pemeliharaan jaringan/instalasi kendaraan operasional dan kantor pusat dan cabang tahun 2023 dan 2024	PUTUSAN NOMOR : 015/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2025
16	023/KINTB/PSI-REG/IX/2025	LUMBOK ATE UNTUK KEMANUSIAAN (LAUK)	CV FORTUNA	1. Salinan Dokumen Informasi nama-nama seluruh kios yang ada di bawah binaan/naungan CV Fortuna di Kab. Lombok Tengah Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 2. Salinan Dokumen Informasi RDKK seluruh kelompok tani yang jatuh/aleksi papak subsidiya disalurkan atau yang penekunanya melalui CV Fortuna di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 beserta jumlah aleksi papak bersubsidi untuk setiap kelompok tani	Dalam Proses Penyelesaian
17	024/KINTB/PSI-REG/IX/2025	LUMBOK ATE UNTUK KEMANUSIAAN (LAUK)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan dokumen informasi DPA Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PASU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 2. Salinan dokumen informasi kontrak kerja/perjanjian kerja penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Tahun Anggaran 2025 se Kabupaten Lombok Tengah dan	Dalam Proses Penyelesaian

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				Salinan dokumen informasi kontrak kerja penataan lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025	
18	029/KINTB/PSI-REG/XI/2025	SADDAM HUSEN	SMPN 1 PRAYA BARAT	1. Dokumen DPA Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMPN 1 Praya Barat Tahun Anggaran 2025 2. Dokumen Informasi daftar kelompok pekerja atau CV pekerja program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMPN 1 Praya Barat Tahun Anggaran 2025 3. Dokumen Informasi Gambar Perencanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMPN 1 Praya Barat Tahun Anggaran 2023-2025. 4. Dokumen Informasi Nerangka Acuan Kerja (KAK) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMPN 1 Praya Barat Tahun Anggaran 2025 5. Dokumen Informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SMP 1 Praya Barat Tahun 2025	Dalam Proses Penyelesaian
19	031/KINTB/PSI-REG/XII/2025	WINOTO	BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH	Salinan yang dilegalisir Warak yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 836 tertanggal 7 April 2014, dengan luas 42.500 M2 (empat puluh dua ribu delapan puluh meter persegi), yang berlokasi di Dusun Terdon, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama MUSTARIN dan sertifikat Hak Milik Nomor : 837 tertanggal 7 April 2014, dengan luas 42.590 M2 (empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), yang berlokasi di Dusun Selong Belanak, Desa	Dalam Proses Penyelesaian

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN
				Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama RINTO ANGGARA	
20	032/KINTB/PSI-REG/XII/2025	FP4-NTB	DESA BUNUT BAKK KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. Salinan APBDex Tahun Anggaran 2024-2025, beserta rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa 2. Data seluruh Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan fisik maupun pengadaan barang dan jasa tahun 2024-2025, termasuk spesifikasi teknis, nilai kontrak, dan pihak pelaksana 3. Salinan dokumen izin eksplorasi dan pemanfaatan air tanah (sumur bor) di wilayah Desa Bunut Bakk, termasuk kajian teknis maupun rekomendasi dari instansi terkait	Dalam Proses Penyelesaian

E. Prestasi

Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2021-2023 mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB. Di tahun 2021 PPID Kabupaten Lombok Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik INFORMATIF dengan posisi peringkat I katagori Kabupaten/kota se-NTB, tahun 2022 PPID Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota INFORMATIF dengan posisi peringkat VI, yang ketiga tahun 2023 PPID Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota INFORMATIF. Sedangkan ditahun 2024 PPID Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota MENUJU INFORMATIF. Dan ditahun 2025 PPID Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota INFORMATIF peringkat ke IV. (Foto penghargaan ada di Lampiran

Di Tingkat Provinsi Desa Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa mewakili Desa- desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Katagori Desa Berkembang dari Komisi Informasi NTB. (Foto penghargaan ada di Lampiran)

F. Penutup

Dengan demikian, laporan keterbukaan informasi publik Tahun 2025 Kabupaten Lombok Tengah kami sampaikan sebagai wujud komitmen kami untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk lebih memahami serta terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.

Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Utama Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Laporan ini mencerminkan upaya PPID dalam melaksanakan tanggung jawabnya di tahun 2025. Ke depannya, PPID akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi, demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

Praya, 22 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 19690815 198903 1 007

Lampiran Penghargaan



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Tahun 2025



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2021



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Tahun 2022